

Pengaruh Money Politik dalam Pemilihan Kepala Desa di Dusun VIII Komplek Veteran Desa Medan Estate

Raja Songkup Pratama¹, Putri Permata Assiddiq Harahap², Pebryna Riosa Siburian³, Julia Ivanna⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan

Email: rajasongkuppratama@gmail.com¹, putrypermaataa@gmail.com², pebrinasiburian495@gmail.com³, juliaivanna@unimed.ac.id⁴

Abstrak

Politik uang dalam pemilihan kepala desa (Pilkades) di Indonesia, khususnya di Dusun Komplek Veteran di desa Medan Estate. Bahwa politik uang adalah praktik yang merugikan demokrasi, karena mengurangi kualitas dan integritas pemimpin desa, serta menimbulkan korupsi dan konflik sosial. Faktor yang menyebabkan masyarakat desa mudah terpengaruh oleh politik uang, seperti rendahnya pendidikan politik, lemahnya perekonomian, dan kurangnya pengawasan dan sanksi. Langkah yang dapat dilakukan untuk menghapus politik uang dalam Pilkades, seperti meningkatkan pendidikan politik, mendorong partisipasi masyarakat, menguatkan pengawasan dan sanksi, dan membangun budaya politik yang bersih dan transparan. dan dalam penelitian peneliti menggunakan metode kualitatif dengan metode angket atau kuesioner dengan menyebarkan angket kepada masyarakat.

Kata Kunci: : *Politik Uang, Pemilihan Kepala Desa*

Abstract

Money politics in village head elections (Pilkades) in Indonesia, especially in the Veterans Complex Hamlet in Medan Estate village. That money politics is a practice that is detrimental to democracy, because it reduces the quality and integrity of village leaders, and gives rise to corruption and social conflict. Factors that cause village communities to be easily influenced by money politics include low political education, a weak economy, and a lack of supervision and sanctions. Steps that can be taken to eliminate money politics in village elections include improving political education, encouraging community participation, strengthening supervision and sanctions, and building a clean and transparent political culture. and in the research the researcher used a qualitative method with a questionnaire method by distributing questionnaires to the community.

Keywords : *Money Politics, Village Head Election*

PENDAHULUAN

Pemilihan kepala desa adalah suatu proses untuk melahirkan pemimpin yang adil di dalam suatu desa, berintegritas, mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Secara konseptual, pemilihan kepala desa adalah sarana perwujudan kedaulatan rakyat. Dengan jalan pemilihan kepala desa, legitimasi kekuasaan rakyat diwujudkan melalui penyerahan sebagian kekuasaan dan hak rakyat kepada kepala desa atau pemimpinnya. Tetapi, dalam faktanya, proses dalam pemilu banyak terjadi pelanggaran utamanya pada saat dilaksanakannya kampanye, Jenis pelanggaran kampanye yang sering terjadi dalam pemilihan kepala desa adalah money politic. money politic termasuk tindakan penyimpangan dari kampanye yang bentuknya dengan cara memberikan uang kepada simpatisan ataupun masyarakat agar mereka agar mereka memilih kandidat tersebut pada saat diselenggarakannya pemilihan kepala desa. Di Negara yang mengaut sistem demokrasi ini,

maraknya money politik perlahan akan menggerus prinsip demokrasi itu sendiri, karena suara rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dapat ditebus dengan rupiah.

Pilkades menjadi suatu tradisi yang terjadi pada masyarakat setiap bergantinya periode. Politik uang ini menjadi semarak untuk memeriahkan pilkades. Bahkan beberapa orang menganggap bahwa adanya politik uang ini semakin menarik, mereka dapat menyaksikan serta “terciprat” untung. Pemberian uang pada masyarakat seringkali diintrepetasikan bergama oleh masyarakat. Seperti untuk memilih calon tersebut, menghargai masyarakat, hingga mengganti partisipasi masyarakat. Seperti pada hasil diatas bahwa masih banyak individu yang tidak ingin pergi untuk menggunakan suara mereka. Hal ini dikarenakan berbagai aspek seperti tidak mengenal calon kepala desa, tidak memiliki waktu karena bekerja, serta beranggapan bahwa orang lain akan memilih sehingga suara mereka tidak berdampak. Maka dari itu sesuai dengan teori yang diambil maka politik uang sudah mengakar di masyarakat, sehingga menjadi suatu fenomena yang selalu terjadi setiap periodenya.

Politik uang merupakan momok terbesar dalam setiap rekrutmen politik, termasuk dalam pemilihan kepala desa (Pilkades). Melalui pilkades diharapkan terpilih pemimpin-pemimpin desa yang berkualitas sesuai dengan kehendak rakyat, namun dalam pelaksanaannya, salah satu “pesta demokrasi” ini dipertontonkannya perilaku-perilaku kecurangan, ketidakjujuran, kebohongan-kebohongan dalam kampanye bahkan membohongi masyarakat dengan memberikan uang atau barang menjelang pencoblosan agar pemilih memilih calon tertentu yang dikenal dengan istilah money politics (politik uang).

Money politik dalam Pilkades merupakan sebuah permasalahan yang merugikan baik bagi calon kepala desa, pemilih, maupun masyarakat desa secara keseluruhan. Money politik dapat menurunkan kualitas demokrasi dan partisipasi politik masyarakat desa, karena pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya secara rasional, mandiri, dan bertanggung jawab,

melainkan berdasarkan imbalan yang diterima. Money politik juga dapat merusak nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat desa, seperti gotong royong, kekeluargaan, dan kebersamaan, karena dapat menimbulkan konflik, permusuhan, dan perpecahan antara pendukung calon kepala desa yang berbeda. Selain itu, money politik dapat mempengaruhi kinerja dan kesejahteraan pemerintahan desa, karena calon kepala desa yang terpilih dapat melakukan korupsi, nepotisme, dan kolusi untuk mengembalikan modal politik yang telah dikeluarkan.

Selama ini dalam pemilihan kepala desa praktik politik uang tidak dapat dihilangkan karena sebagian masyarakat menggunakan ini sebagai gudang keuntungan dan juga praktek politik uang ini juga dapat menghilangkan kesempatan munculnya bagi para pemimpin yang berkualitas karena pada akhirnya mereka yang mempunyai harta atau uang yang paling banyak dapat memegang dan memenangkan kedaulatan dan mengontrol sebuah kekuasaan. Money politik juga sering bisa menjadi potensi memunculkan sebuah kebencian serta permusuhan di sebagian khalayak masyarakat. Sebuah studi menemukan fakta bahwa model ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing kandidat kepala desa cenderung merupakan kombinasi antara modal pribadi dan bantuan donatur politik.

Idealnya dalam sebuah pemilihan kepala desa sebaiknya harus bebas dari money politik, yang di mana selain dapat meredam gejolak sosial politik tapi dapat juga melahirkan pimpinan daerah yang berkualitas yang mampu memimpin serta memiliki kemauan, dan kepedulian kepada masyarakat serta mempunyai semangat tinggi disertai kepekaan hati nurani untuk memimpin suatu daerah dan masyarakat. Sudah sering dikarenakan pengaruh politik uang masyarakat asal memilih seorang pemimpin yang berkualitas.

METODE

Desain penelitian merupakan model atau metode yang digunakan peneliti untuk melakukan suatu penelitian yang memberikan arah terhadap jalannya penelitian. Desain penelitian ditetapkan berdasarkan tujuan dan hipotesis penelitian (Creswell, 2016). Desain penelitian adalah model atau metode penelitian yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian yang bertujuan untuk mencapai apa yang dituju dan sesuai seperti yang diharapkan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna. Sugiyono (2018).

2. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk mendapatkan kembali pemecahan terhadap segala permasalahan yang diajukan. Sedangkan menurut Priyono (2016:1) Metode Penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan angket atau kuesioner. Menurut Sugiyono (2017:142) angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.

3. Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di Dusun VIII Komplek Veteran Desa Medan Estate kecamatan Percut Sei Tuan dengan mendatangi rumah warga dan menyebarkan angket.

4. Waktu Penelitian

Peneliti melakukan penelitian pada tanggal 3 November 2023.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktek politik uang yang terjadi di Dusun Komplek Veteran di desa Medan Estate yang dilaksanakan pada bulan April 2023 yang dimana terjadi pemilihan kepala desa ,masih terjadi praktek money politik. Money politik adalah upaya menyuap masyarakat pemilih dengan menawarkan uang, jasa, atau materi lain agar suara pemilihan tertentu dapat dialokasikan kepada orang yang menyuapnya.Cara penerapan kebijakan politik seperti ini dapat menciptakan situasi antara pemberi dan penerima kebijakan untuk mencapai dari target mereka. Pihak calon kepala memberikan suatu bentuk pertukaran dan kerjasama dengan penerima uang dengan harapan penerima uang dapat membantu dengan memilih calon kepala desa dalam pemilihan desa dan orang yang memberi sesuatu juga memberikan sesuatu kepada penerima uang politik yang disepakati.

Masyarakat sering tidak dapat menolak uang yang diberikan oleh calon kepala desa di karenakan kendala yang dihadapi masyarakat ketika menolak melakukan kebijakan politik uang adalah karena lemahnya perekonomian masyarakat, rendahnya pemahaman terhadap kebijakan money politic, dan rasa tidak enak menolak yang membuat mereka tidak nyaman ketika menolak pemberian sumbangan dari para calon.Sumbangan para calon pada pilkades menambah kebutuhan sehari-hari mereka.Meski yang didapat tidak banyak, namun sangat dinantikan karena dapat membantu kehidupan sehari – hari masyarat yang menerima uang dari pilkades. Kurangnya pemahaman dan kemauan masyarakat untuk menerima uang dari pilkades menjadi hal utama menghambat implementasi kebijakan demokrasi . Keadaan ini menyebabkan tingginya tingkat kebijakan moneter di masyarakat.Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan moneter terjadi karena pemahaman masyarakat terhadap kebijakan moneter sangat lemah dan perekonomian lemah, ditambah dengan minimnya devisa negara.pengungkapan sejumlah calon kepala desa .

Berdasarkan pengalaman selama ini, praktik politik uang dalam pemilihan kepala desa di berbagai desa, menghilangkan kemungkinan munculnya pemimpin berkualitas, karena pada akhirnya hanya mereka yang punya uang yang baru terpilih dan memegang kedaulatan dan kekuasaan pengendali. Dalam konteks perekonomian, penerapan kebijakan moneter memfasilitasi praktik korupsi yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kebijakan moneter juga dapat menimbulkan permusuhan dan permusuhan di antara anggota masyarakat.Idealnya, pilkada harus bebas dari kebijakan moneter yang tidak hanya mampu meredam gejolak sosial politik namun juga memungkinkan munculnya pemimpin desa yang berkualitas dan konkrit adalah pemimpin yang mempunyai kemauan untuk peduli, mempunyai

kapasitas dan legitimasi terhadap konstituennya, dan mempunyai semangat yang tinggi disertai hati nurani yang peka.

Di dusun di Dusun Komplek Veteran di desa Medan Estate pengaruh uang dalam setiap pemilihan kepala desa masih banyak dapat mempengaruhi pilihan seseorang. Ada kalanya uang siapa yang paling banyak di berikan oleh sang calon pilkades maka dia yang akan menjadi pemenangnya dalam pemilihan tersebut. Hal ini dapat terjadi karena beberapa orang tidak memahaminya, namun banyak orang yang memahami tindakan ini dan menerimanya secara terbuka karena kebutuhan untuk mempertahankan nyawanya. Untuk mencegah hal tersebut, Pemerintah Desa Medan Estate dan panitia bersinergi menerapkan langkah-langkah canggih dengan dua cara, yaitu persuasi dan penyadaran politik di masyarakat tentang pentingnya mencegah penerapan Kebijakan politik uang.

Praktik politik uang ini juga sangat membantu para calon kepala desa karena siapa yang memiliki sumber daya finansial lebih besar daripada calon lainnya maka dia yang akan lebih besar dalam memenangkan pertarungan dalam pemilihan pilkades. Aktivitas politik uang bukan lagi hal baru di Dusun Komplek Veteran, namun warga Dusun Komplek Veteran akan lebih memahami politik uang jika dijelaskan dalam bentuk , menyumbangkan uang dan barang yang dilakukan oleh calon, atau kelompok sukses untuk meminta uang mereka. Setelah masyarakat menerima uangnya maka mereka akan berjanji untuk memberikan suaranya pada pemilihan kepala desa yang akan datang. Memang tidak jarang lagi komunitas masyarakat menghadapi penegakan kebijakan moneter yang terjadi pada pemilu desa.

Beberapa studi di berbagai daerah menjelaskan bermacamnya arti uang itu bagi penerima misalkan yang diungkapkan oleh Schaffer dan Scheduler (2007, 25-27), bahwa para penerima ada yang mengartikan sebagai bayaran, hadiah, ganti rugi dosa masa lalu, perundungan, pengenalan kebijakan seorang calon, pengenalan kejelekan seorang calon, sekaligus ada juga yang mengibaratkan sebagai tanda kekuatan Pada teori fenomenologi Alfred Schutz ada dua hal yang penting diamati diantaranya bagian pengetahuan dan perbuatan. penting dari pengetahuan pada kehidupan sosial menurut Alfred Schutz yaitu akal untuk menjadi sebuah pengatur dari pemahaman manusia pada kehidupan kesehariannya. Karena akal adalah indera yang asli dengan mengaitkan pendengaran, penglihatan, dan peradaban yang sering dijembatani dan dibarengi pemikiran dan aktivitas kesadaran. Bagian pengetahuan yang terdapat dalam fenomenologi Alfred Schutz adalah kehidupan keseharian. Sebagian besar masyarakat Desa Ladang Panjang merupakan masyarakat tingkat ekonomi menengah.

Faktor ekonomi merupakan tumpuan bagi masyarakat untuk turut menerima politik uang yang ditawarkan oleh calon kepala desa hal ini sejalan dengan teori fenomenologi dimana mencari jawaban terkait arti dari suatu fenomena, pemilih akan memilih kalau ia merasa ada balasan yang akan diterima. Ketika pemilih merasa tidak memperoleh keuntungan dengan memilih calon kepala desa yang sedang bertarung, ia tidak akan ikut serta dan melaksanakan pilihan pada proses Pilkades hal ini juga searah dengan pilar ekonomi dan hitung ekonomi. Pendekatan ini juga mengandaikan bahwa calon kepala desa akan melaksanakan berbagai advertensi dan kampanye dengan maksud menarik perhatian dan keinginan masyarakat untuk memilih dirinya pada pemilihan.

Politik uang yang terjadi dalam pemilihan kepala desa (Pilkades) di Dusun VIII Komplek Veteran desa Medan Estate karena tingginya persaingan antara calon dan rendahnya kesadaran politik masyarakat desa. Politik uang dapat merusak kualitas demokrasi di tingkat lokal, karena mengurangi partisipasi politik yang substantif dan rasional. Pemilih yang menerima politik uang cenderung tidak kritis terhadap kinerja dan program calon, dan hanya memilih berdasarkan imbalan yang diterima. Politik uang juga dapat menimbulkan konflik sosial dan korupsi di desa, karena calon yang menang harus mengembalikan modal yang telah dikeluarkan untuk membeli suara.

Dalam perjalannya bahwa politik uang ini merupakan tindakan membagi-bagikan uang, barang dan jasa sudah mengalami pembiasaan makna. Sedangkan batasan pelaku politik uang menurut Ismawan adalah orang yang memberi uang politik baik kandidat,

pendukung atau tim sukses dan penerima uang politik dalam bentuk apapun. Politik uang dilakukan dengan sadar oleh pihak-pihak yang melakukan praktik politik uang.

Oleh karena itu, politik uang harus dihilangkan dalam Pilkades agar demokrasi di desa dapat berkembang dengan sehat dan partisipasi politik dapat meningkat. Dengan menghapus politik uang dalam Pilkades, diharapkan masyarakat desa dapat lebih aktif dan kritis dalam berpartisipasi politik, serta dapat memilih pemimpin yang berkualitas dan bertanggung jawab. Demokrasi di desa dapat berjalan dengan lebih baik dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

SIMPULAN

Pemilihan kepala desa adalah suatu proses untuk melahirkan pemimpin yang adil di dalam suatu desa, berintegritas, mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam pemilihan sering terjadi yang namanya money politik, yaitu perilaku yang dilakukan para calon kepala desa dengan memberi sejumlah uang kepada Masyarakat dengan tujuan mendapatkan suara Masyarakat tersebut. Masyarakat sering tidak dapat menolak uang yang diberikan oleh calon kepala desa di karenakan kendala yang dihadapi masyarakat ketika menolak melakukan kebijakan politik uang adalah karena lemahnya perekonomian masyarakat, rendahnya pemahaman terhadap kebijakan money politic, dan rasa tidak enak menolak yang membuat mereka tidak nyaman ketika menolak pemberian sumbangan dari para calon.

Oleh karena itu, politik uang harus dihilangkan dalam Pilkades agar demokrasi di desa dapat berkembang dengan sehat dan partisipasi politik dapat meningkat. Dengan menghapus politik uang dalam Pilkades, diharapkan masyarakat desa dapat lebih aktif dan kritis dalam berpartisipasi politik, serta dapat memilih pemimpin yang berkualitas dan bertanggung jawab. Demokrasi di desa dapat berjalan dengan lebih baik dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, P. (2022). Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa: Benarkah Penentu Pilihan bagi Pemilih? *JURNAL ILMIAH ILMU PEMERINTAHAN*, 152-162.
- Fatchuriza, M. (43-50). Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus Deskriptif-Kualitatif Pemilihan Kepala Desa Tahun 2020 Di Desa Tanjungmojo, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah). 2020.
- Fauz, S. A. (2021). Fenomena Money Politik pada Pemilihan Kepala Desa Petiken Tahun 2018. *Dinamika Sosial Budaya*, 171-179.
- Fauzi, S. A. (2021). Fenomena Money Politik pada Pemilihan Kepala Desa Petiken Tahun 2018. *Dinamika Sosial Budaya*, 171-179.
- Indonesia, M. P. (2021). Eza Helyatha . *SOL JUSTICIA*, 105-122.
- Letari, S. A. (2019). Praktek Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019(Studi Kasus Desa Pesantren Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas). *Politik Indonesia*, 1-8.
- Mohamad Amanu. (2015). Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Desa (Studi Kasus di Desa Jatirejo Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri). *Jurnal Mahasiswa Sosiologi Universitas Brawijaya*, 1-10.
- Nabila, N. (2020). Pengaruh Money Politic Dalam Pemilihan Anggota Legislatif Terhadap Keberlangsungan Demokrasi Di Indonesia. *NOTARIUS*, 138-153.
- Rahmi, N. A. (2022). Praktik Politik Uang Pada Pemilihan Kepala Desa. *Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, 423-431.